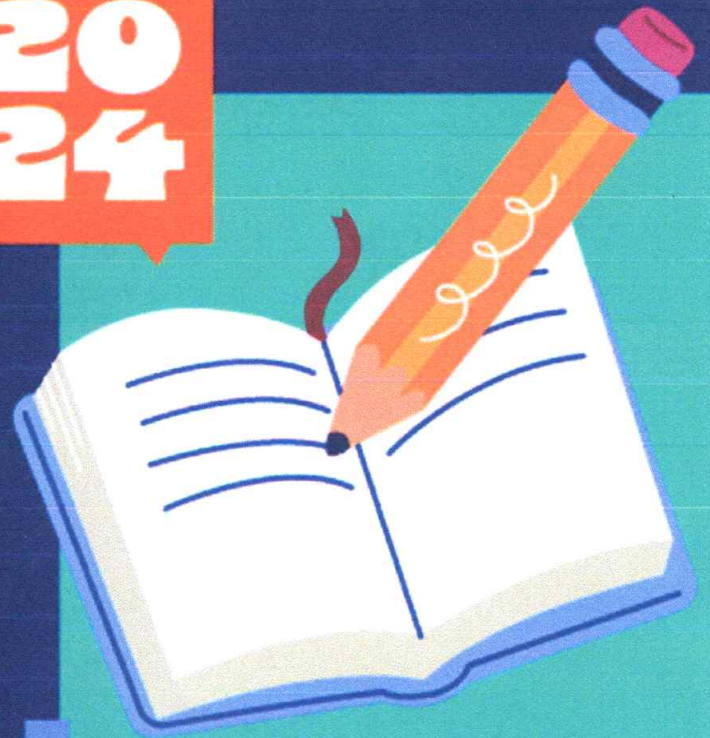
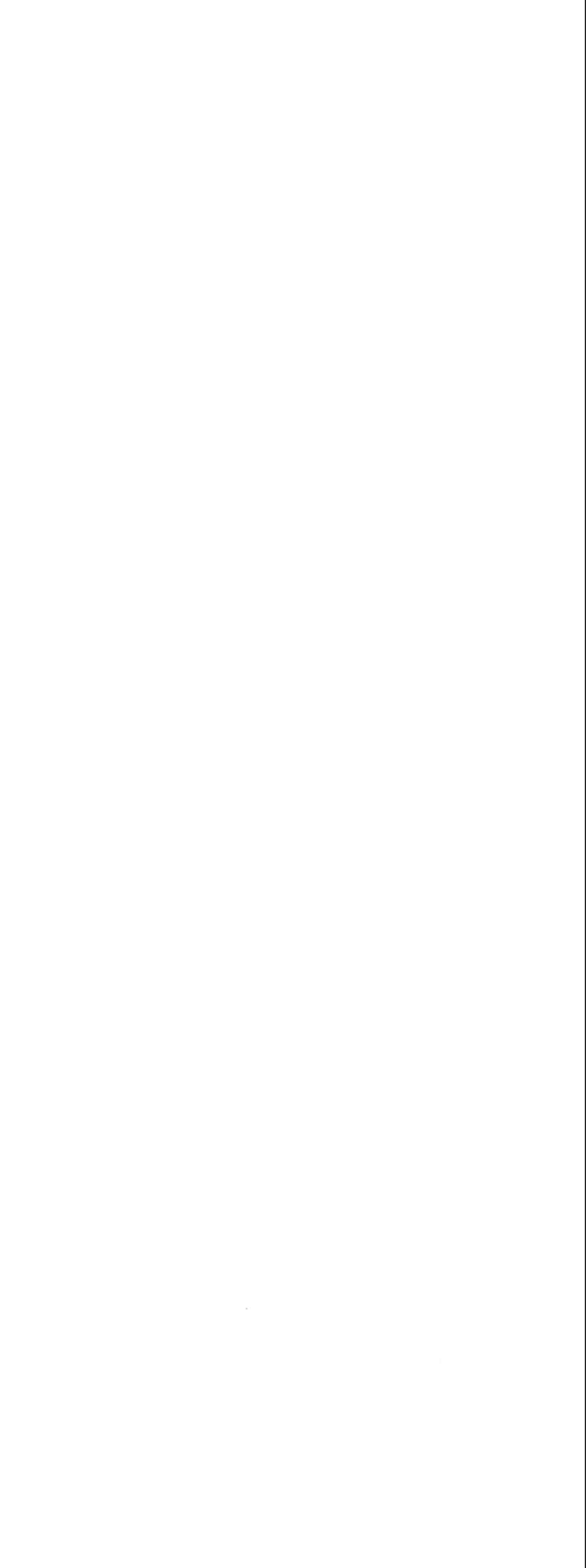
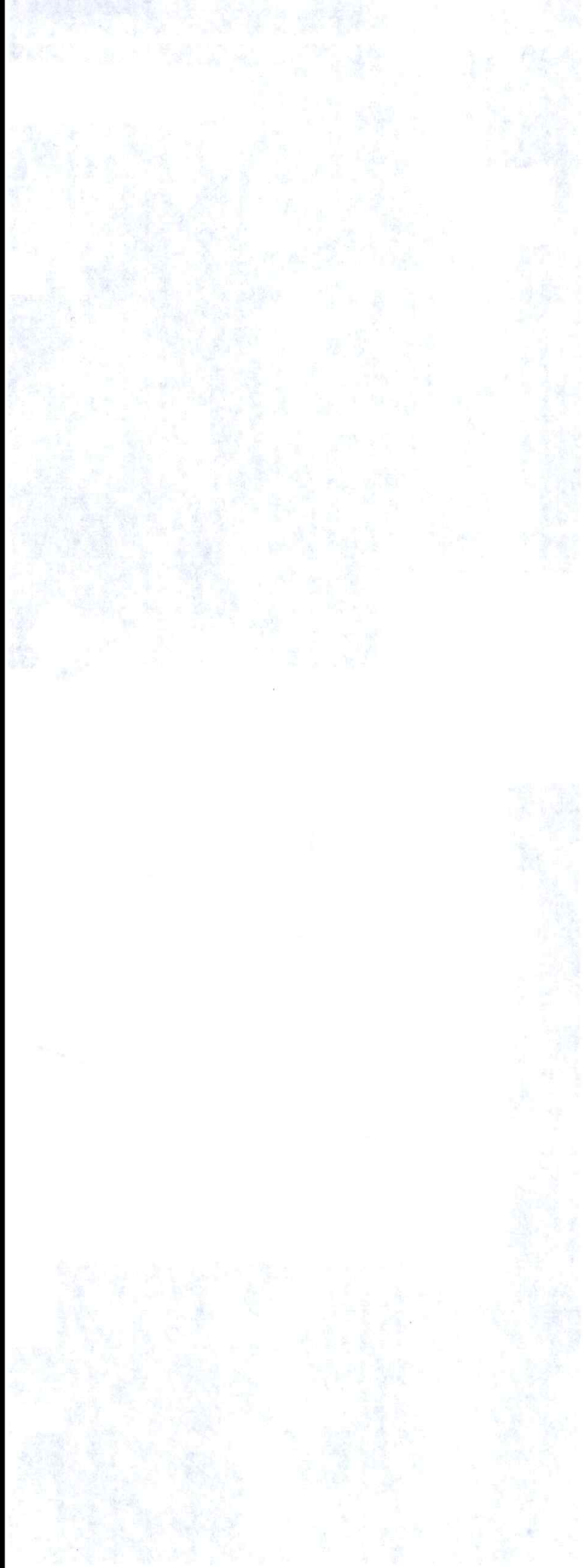


20  
24



*Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi  
perbendaharaan dan Gaji Terkait  
Pembayaran Belanja Pegawai  
Tahun 2024*



LAPORAN PERJALANAN DINAS  
NOMOR TU.04/21/PKTN.4.4/ST/02/2024

- Kepada : Kuasa Pengguna Anggaran
- Dari : 1. Ridwan Hasan
- Hal : Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi perbendaharaan dan Gaji  
Terkait Pembayaran Belanja Pegawai
- Lampiran : Dokumentasi Kegiatan dan Surat Tugas
- Tanggal : 01 s.d. 02 Maret 2024
- Menimbang : Bahwa perlunya melakukan rapat koordinasi pengelolaan perbendaharaan dan gaji terkait pembayaran belanja pegawai dalam rangka penerapan sentralisasi gaji di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga;  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;  
3. Surat Tugas Nomor TU.04/21/PKTN.4.4/ST/02/2024 tanggal 29 Februari 2024  
4. Undangan a.n Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Ketua Tim Bidang Keuangan dan BMN Nomor 5 / PKTN.1.3/UND/02/2024 tanggal 26 Februari 2024.
- Isi Laporan : 1. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Tim Bidang Keuangan dan BMN, PPK, dan PPABP dari Sekertariat Ditjen PKTN  
2. Pembahasan kegiatan:  
a. Pada Sekretriati Ditjen PKTN terdapat 3 (tiga) anak Satker untuk pembayaran Belanja Pegawai dengan Bank Payrol BRI, BSI, dan Bank Mandiri.ditutup  
b. Pengajuan Tunkin diproses oleh Ses Ditjen PKTN da ditutup tanggal 4 (empat) setiap bulannya dan pengajuan ke KPPN paling lambat tanggal 6 setiap bulannya dengan

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial data. This includes not only sales and purchases but also expenses and income. The document provides a detailed explanation of how to categorize these transactions and how to use a double-entry system to maintain the accounting equation.

Next, the document covers the process of reconciling bank statements. It explains that this is a crucial step in ensuring that the company's records match the bank's records. The process involves comparing the company's cash account with the bank statement, identifying any discrepancies, and determining the reasons for them. Common reasons include bank charges, deposits in transit, and outstanding checks.

The document also discusses the importance of regular backups of financial data. It advises that data should be backed up frequently to prevent loss in the event of a system crash or other disaster. It provides a step-by-step guide on how to perform these backups and how to verify that the data has been saved correctly.

Finally, the document concludes with a summary of the key points discussed. It reiterates the importance of accuracy, regular reconciliation, and data backup. It also provides a list of resources for further information, including books, articles, and online courses. The document is intended to serve as a comprehensive guide for anyone responsible for managing a company's financial records.

- melampirkan daftar CSV dan daftar nominative ke Ses Ditjen PKTN.
- c. Pengajuan uang makan diproses oleh Ses Ditjen PKTN dengan mengirimkan format excel kemenkeu yang didownload dari aplikasi Sipeg.
  - d. Pengajuan Lembur diproses oleh Ses Ditjen PKTN sebelum tanggal 10 setiap bulannya sesuai dengan ketersediaan anggaran satker dengan mengirimkan lampiran rincian dan jam lembur pegawai.
  - e. Perubahan data pegawai kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, kekurangan gaji di input oleh masing-masing satker.
  - f. Pengajuan dan pembayaran THR 2024 akan dibayarkan di akhir bulan Maret.
  - g. Pengalihan pagu belanja pegawai akan dialihkan sepenuhnya pada bulan April.
  - h. Pembayaran gaji ke 13 tahun 2024 direncanakan dibayarkan pada bulan Mei.
  - i. Pengajuan SKPP diproses oleh satker masing-masing.
  - j. Terkait Anggaran PPPK akan digabung ke Ses Ditjen PKTN.
  - k. LS perjalanan dinas akan langsung di transfer ke rekening masing-masing pegawai.
  - l. Terkait perpindahan rekening dan perubahan rek payroll sementara di hold sampai dengan proses pembayaran THR.

3. Kesimpulan :

- Koordinasi pengelolaan perbendaharaan dan gaji terkait pembayaran belanja pegawai sebagai tindak lanjut terkait sentralisasi belanja pegawai pada Ses Ditjen PKTN sehingga pengawasan anggaran dapat lebih terkontrol dan berpusat pada Ses Ditjen PKTN.

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas

Gowa, 5 Maret 2024

Yang Melakukan Perjalanan Dinas,

1. Ridwan Hasan

(  )

the same, but the number of individuals per population is small. The population size is not large enough to allow the evolution of a new mutation to spread, but it is large enough to allow the fixation of a new mutation that has already spread in another population.

There are two main reasons why the number of individuals per population is small. First, the number of individuals per population is small because the number of individuals per population is small. Second, the number of individuals per population is small because the number of individuals per population is small.

The number of individuals per population is small because the number of individuals per population is small. The number of individuals per population is small because the number of individuals per population is small.

The number of individuals per population is small because the number of individuals per population is small. The number of individuals per population is small because the number of individuals per population is small.

The number of individuals per population is small because the number of individuals per population is small. The number of individuals per population is small because the number of individuals per population is small.

The number of individuals per population is small because the number of individuals per population is small. The number of individuals per population is small because the number of individuals per population is small.

The number of individuals per population is small because the number of individuals per population is small. The number of individuals per population is small because the number of individuals per population is small.

The number of individuals per population is small because the number of individuals per population is small. The number of individuals per population is small because the number of individuals per population is small.

## DOKUMENTASI KEGIATAN









**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**  
**BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL IV**  
Jalan Tumanurung Raya No. 4A, Sungguminasa, Kabupaten Gowa,  
Sulawesi Selatan  
0411-887077  
[www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id)

SURAT TUGAS  
NOMOR TU.04/21/PKTN.4.4/ST/02/2024

Dalam rangka melaksanakan tugas Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan dan Gaji terkait Pembayaran Belanja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Jakarta, kami menugasi:

1. Nama / NIP : Ridwan Hasan / 198404112010011012
- Pangkat / Gol : Penata Muda / IIIa
- Jabatan : Pranata Keuangan APBN Mahir (Fungsional Tertentu)

di Sulawesi Selatan selama 2 hari, mulai tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 2 Maret 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV dengan target kinerja atau hasil yang akan dicapai adalah Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan dan Gaji terkait Pembayaran Belanja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Jakarta.

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah dilaksanakan pelaksana tugas segera menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Gowa  
pada tanggal, 29 Februari  
2024

Kepala Balai Standardisasi  
Metrologi Legal Regional IV *ds*



Oki Sri Swastini

NIP:197506251994032001